

KEK

Vol 14 No 1

Tahun 2010

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

- **Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010**
- **Factors Affecting Finance Companies**
- **Analisis Butterfly Strategy Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder**
- **Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006- 2008**
- **Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia**
- **Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 14	No. 1	Jakarta 2010	ISSN 1410-3249	Terakreditasi C (No. Akreditasi : 233/AU1/P2MB1/08/2009)
------------------	---------	-------	--------------	----------------	--

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

- Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010
- Factors Affecting Finance Companies
- Analisis Butterfly Strategy Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder
- Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006-2008
- Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia
- Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010; *Factors Affecting Finance Companies*; Analisis *Butterfly Strategy* Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder; Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap APK Wajar : 2006-2008; Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia; dan Analisis Sektor-sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu R. Nurhidajat, Yoopi Abimanyu, Mohamad Nasir, Abdul Aziz, Adrianus Dwi Siswanto, dan Arti Dyah Woroutami.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2010
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Kumpulan Abstraksi	xi

INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Oleh: R. Nurhidayat	1
---------------------------	---

FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES

Oleh: Yoopi Abimanyu	17
----------------------------	----

ANALISIS BUTTERFLY STRATEGY DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER

Oleh: Mohamad Nasir	27
---------------------------	----

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008

Oleh: Abdul Aziz	53
------------------------	----

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA

Oleh: Adrianus Dwi Siswanto	101
-----------------------------------	-----

ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL

Oleh: Arti Dyah Woroutami	123
---------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Tabel 1.1	Contoh Empat Moda Pemasokan Jasa	4
Tabel 1.2	PDB ASEAN DALAM PPP	6
Tabel 2.1	Jumlah Penumpang Yang Memanfaatkan Transportasi Udara Penerbangan ke Luar Negeri di Indonesia Tahun 2000 – 2005	11
Tabel 2.2	Tourism Impact Index (TII)	13
Tabel 2.3	Tourism Participation Index (TPI)	13

FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES

Tabel 2.1	Contribution of Non Bank Financial Institution in GDP	18
Tabel 2.2	Finance Companies Activities	18
Tabel 2.3	Phillips-Perron Unit Root Tests (Observations = 41)	20

ANALISIS *BUTTERFLY STRATEGY* DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER

Tabel 1.1	Uraian SUN Berkupon Bunga Tetap	29
Tabel 3.1	Perkembangan SBN <i>Tradable</i>	39
Tabel 4.1	Hasil Perhitungan Duration (Years)	41
Tabel 4.2	Ringkasan Hasil Analisis	51

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008

Tabel 2.1	Jenjang Pendidikan dan Kelompok Usia	68
Tabel 3.1	Target Siswa dan Alokasi Pagu Anggaran BOS T.A 2005-2009	69
Tabel 3.2	Biaya Satuan BOS Tahun Anggaran 2005 s.d. 2008	70
Tabel 4.1	Hasil Estimasi Final Model FEM: Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen (APK)	73
Tabel 4.2	<i>Correlation Matrix</i> 4 Variabel Independen	75
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Siswa Penerima BOS Tahun 2008 (Pada Sekolah Sampel di 12 Propinsi)	80
Tabel 4.4	Kontribusi Masing-Masing Variabel Terhadap APK Per Propinsi Tahun 2007-2008	88

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA

Tabel 1.1	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	102
Tabel 4.1	Deforestasi Di Indonesia	113
Tabel 4.2	Estimasi Kerusakan (<i>Baseline</i>) BAU (Hektar)	114
Tabel 4.3	Perkembangan Penurunan Deforestasi 3 Skenario	116
Tabel 4.4	Perkembangan Emisi Yang Dihasilkan Era Penerapan REDD	117
Tabel 4.5	Estimasi Peningkatan Stok Karbon	118
Tabel 4.6	Potensi Pendapatan Penjualan Karbon	119

ANALISIS SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DALAM MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL

Tabel 4.1	Rata-rata Sebaran Pertumbuhan dan Distribusi PDB Tahun 2000-2008 Menurut Sektor	131
Tabel 4.2	Sebaran Pertumbuhan dan Distribusi PDB Tahun 2009 Menurut Sektor	133
Tabel 4.3	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2000	137
Tabel 4.4	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2003	137
Tabel 4.5	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2005	138
Tabel 4.6	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2000	139
Tabel 4.7	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2003	140
Tabel 4.8	Analisis Perkembangan Sektor Unggulan Penghela Perekonomian Tahun 2005	140

DAFTAR GAMBAR

INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Diagram 1.1	Persentase Jasa Terhadap GDP Tahun 2008 Pada Negara-Negara ASEAN	7
Diagram 1.2	Ekspor Jasa ASEAN 2007	8
Diagram 1.3	Impor Jasa ASEAN 2007	8

FACTORS AFFECTING FINANCE COMPANIES

Grafik 2.1	Comparison Between Log Total Financing and Log Exchange Rate	21
Grafik 2.2	Comparison Between First Difference of Log Total Financing and First Difference of Log Exchange Rate	22

ANALISIS *BUTTERFLY STRATEGY* DALAM PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA DI PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER

Grafik 2.1	Harga dan <i>Yield</i> Obligasi	32
Grafik 2.2	Normal <i>Yield Curve</i>	33
Grafik 2.3	<i>R Inverted Yield Curve</i>	34
Grafik 2.4	<i>Humped Yield Curve</i>	35
Grafik 2.5	<i>Flat Yield Curve</i>	35
Gambar 2.6	<i>Immunization – Cash Flow Matching Concept</i>	37
Grafik 3.1	Perkembangan Pinjaman Pemerintah	39
Grafik 3.2	Perbandingan <i>Yield</i> Obligasi Negara	40
Grafik 4.1	Probabilitas <i>Pay Off</i>	45
Grafik 4.2	Laba (Rugi) Portofolio	46
Grafik 4.3	Perkembangan harga FR 21, 26 dan 34	46
Grafik 4.4	Frekuensi Kejadian	47
Grafik 4.5	Profit Portofolio	48
Grafik 4.6	Perkembangan Harga	48
Grafik 4.7	Profit Perkembangan Harga	49
Grafik 4.8	Profit Portofolio	50
Grafik 4.9	Frekuensi Kejadian	50

PENGARUH PROGRAM PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP APK WAJAR: 2006-2008

Gambar 2.1	Pengaruh Kebijakan Subsidi Terhadap Permintaan Pendidikan	67
Gambar 4.1	Pendapat Respon Tentang Ada Tidaknya Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) Setelah Adanya Program BOS	77
Gambar 4.2	Pendapat Respon Tentang Ada Tidaknya Pungutan Ketika Mencairkan Dana BOS	78
Gambar 4.3	Pendapat Respon Tentang Manfaat Program BOS Dalam Mengurangi Jumlah Anak Putus Sekolah	80
Gambar 4.4	Pendapat Respon Tentang Manfaat Yang Paling Dominan Dari Program BOS.....	81

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN DARI MEKANISME REDD
SEKTOR KEHUTANAN DI INDONESIA**

Gambar 3.1 Potensi Kredit Karbon di Indonesia	109
Gambar 3.2 Pendekatan Perhitungan Emisi <i>Gross</i> dan <i>Net</i>	110

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi C****No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009****Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***ABSTRAKSI**

**Nurhidajat, R, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Bidang Jasa Pada Tahun 2010
Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman
1-16**

This is a paper aiming to capture Indonesia's position with regard implementation of Vientiane Action Programme (VAP) mainly in services sector. According to the programe, there are four services sector that will be applied in 2010 which are air travel, information and comunication technology, healthcare, and tourism. A description analysis is used to describe the services sector in both ASEAN and domestic scope. The findings suggest that tourism is one of the sectors which need more atention. Compared with the others, This sector has the biggest share of GDP and national employment. Finally, services liberalization should be applied gardually to minimised negative impact of liberalization..

Key words: Vientiane Action Programme, services, liberalization. ASEAN

Abimanyu, Yoopi, et. al. (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan)

Factors Affecting Finance Companies

**Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman
17 - 26**

Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan dipengaruhi oleh gerakan dari variabel moneter, yakni antara lain nilai tukar dan tingkat bunga pinjaman. Hipotesa dari tulisan singkat ini adalah bahwa kedua variabel moneter tersebut mampu mempengaruhi kinerja dari perusahaan pembiayaan, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Data yang digunakan adalah data bulanan periode Desember 2006 sampai dengan Juni 2009. Analisa yang digunakan adalah pendekatan grafik (visual inspection) dan ekonometri, yakni Johansen Cointegration untuk hubungan jangka panjang dan Granger Causality untuk hubungan jangka pendek. Hasil analisa grafik menunjukkan bahwa dari sisi asset, total pembiayaan (termasuk komponennya yakni pembiayaan melalui consumer finance maupun leasing) tidak converge, baik dengan nilai tukar maupun tingkat bunga pinjaman. Hasil analisa ekonometri Johansen Cointegration juga menunjukkan bahwa total pembiayaan termasuk komponennya tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan nilai tukar dan

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi C****No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009****Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI**

tingkat bunga pinjaman. Mereka tidak cointegrated. Analisa jangka pendek dengan menggunakan Granger Causality juga tidak menunjukkan pola keterkaitan antara variabel moneter dan komponen asset dari perusahaan pembiayaan. Dari sisi pasiva, pendekatan grafik ternyata menunjukkan bahwa total pinjaman (dan komponennya, yakni pinjaman dalam negeri dan luar negeri) nampaknya converge dengan nilai tukar maupun tingkat bunga pinjaman. Analisa formal dengan ekonometri menunjukkan bahwa total pinjaman dan komponennya weakly cointegrated dengan nilai tukar dan sepenuhnya cointegrated dengan tingkat bunga pinjaman. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroekonomi yang tepat (realisasi kebijakan sama dengan target kebijakan dimana tidak ada over excessive ataupun under excessive macropolicies) yang mampu menghasilkan nilai tukar yang stabil dan tingkat bunga yang relatif rendah, akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan pembiayaan dari sisi pasiva.

Kata Kunci : macroeconomics, financing, granger causality tests, exchange rate

Nasir, Mohamad , et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis *Butterfly Strategy* Dalam Portofolio Surat Utang Negara di Perdagangan Pasar Sekunder

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 27-52

Regularly, Government of Indonesia funds its deficit budget by issuing government bond called Surat Utang Negara (SUN). For investors, existing SUN is an opportunity investment to reach return. However, to reach it is not easy, and it needs strategy. The report describes the performance of SUN's portfolio by using butterfly strategy approach. By using sample data and assumptions, those strategies have a good performance for portfolio A B and C. It can be showed by positive pay off resulted by the strategy. Portfolio A that contains SUN FR 21, 26 and 34 can result positive pay off with probability 88.84%, portfolio B can reach 93.41% chance to reach profit and portfolio C can result 74.39% chance..

Keywords : Butterfly Strategy, Cash Matching, Macaulay Duration, Modified Duration, Immunization, Surat Utang Negara, Yield

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi C****No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009****Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010***Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.***ABSTRAKSI****Aziz, Abdul, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)****Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap APK Wajar : 2006 – 2008****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 53 - 100**

Penelitian ini fokus pada analisis pengaruh program-program pemerintah bidang pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP: 2006 – 2008. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan estimasi Data Panel Model Efek Tetap. Hasil penelitian ini menyarankan keharusan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam keberhasilan pendidikan nasional dan menyarankan agar ada sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut sehingga dampak positif dari kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Peneliti ini juga menyarankan agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah dana pada program bidang pendidikan ini karena hasil estimasi menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara peningkatan dana dan peningkatan APK.

Kata Kunci: Pengaruh Program Pemerintah Bidang Pendidikan, APK Wajar

Siswanto, Adrianus Dwi, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)**Analisis Potensi Pendapatan Dari Mekanisme REDD Sektor Kehutanan di Indonesia****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 101 – 122**

Indonesia faces serious problems in the forestry sector. The forest area covers about 70 percent of the total area spread over 33 provinces, have been damaged more than 37 percent on many levels. Department of Forestry reported deforestation reached 1 million hectares per year since 2000. If the condition is not change then the year 2050 the entire forest will be gone.

This study focus to calculate the value of potential income that can be accepted if the REDD mechanism is applied in Indonesia. The methodology used in this study are mathematics and descriptive statistics using secondary data. Source of data are obtained the Central Bureau of Statistics and Ministry of Forestry and other sources.

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi C****No. Akreditasi : 233/AU1/P2MBI/08/2009****Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI**

The results showed that according the baseline, the growth trends in deforestation by using 2000 - 2005, Indonesian forest destruction reached 35.277 million hectares on 2017 with 15 percent growth assumption damage.

By implementing 3 simulations assuming that the decreased the rate of deforestation by 15 percent, 50 percent and 75 percent, the study provides results that the potential revenue are vary from of U.S. \$ 20.155 million to U.S. \$ 532.530 million. Estimated potential revenue is determined by the ability to decrease the growth rate of deforestation. The higher the ability to decrease the rate of deforestation, the higher the potential for carbon stock is maintained. On the other side encouraging the increasing deforestation of forest produce higher emissions more carbon stock disappear.

Keywords: REDD, deforestation, potential revenues, the stock of carbon.

Woroutami, Arti Dyah, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Sektor-sektor Unggulan Dalam Menggerakkan Sektor Riil

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 14 Nomor 1 Tahun 2010, halaman 123 - 142

External fluctuation happened on global economy could be anticipated by Indonesia Government through a good coordination between fiscal and monetary policy. It is reflected from the Indonesia's positive economic growth on 2009 which reached 4,5 percent. But Indonesia's economic growth acceleration still retained by the low activity on real sector, so worried about the creation of sustainable economic growth. Regarding that, it needs priority sharpening for sectors which has superiority on motivating the economy.

To answer the problem, this article seek to identify business sectors which has superiority within economy and to formulate the policy needed to develop those sectors. The analysis is done by using Input Output table with backward linkage and forward linkage approach. Because of the limited data source, the analysis only from year 2000 until 2005.

The output shows that there are 6 (six) sectors which has superiority within economy, that is Chemical Industry, Pesticide Fertilizer Industry, Other Food Industry, Rubber and Pesticide Industry, All-kind of Flour Industry, and Water, Gas and Electricity. For those superior sectors needs to be done a priority program thorough budget spending policy.

Keywords: Economic growth, superior sector, backward linkage and forward linkage.

INDONESIA DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI BIDANG JASA PADA TAHUN 2010

Oleh
R. Nurhidayat¹

Abstract:

This is a paper aiming to capture Indonesia's position with regard implementation of Vientiane Action Programme (VAP) mainly in services sector. According to the programe, there are four services sector that will be applied in 2010 which are air travel, information and comunication technology, healthcare, and tourism. A description analysis is used to describe the services sector in both ASEAN and domestic scope. The findings suggest that tourism is one of the sectors which need more atention. Compared with the others, This sector has the biggest share of GDP and national employment. Finally, services liberalization should be applied gardually to minimised negative impact of liberalization..

Key words: Vientiane Action Programme, services, liberalization. ASEAN

I. PENDAHULUAN

Liberalisasi perdagangan jasa memiliki latar belakang yang berbeda dengan perdagangan barang. Perundingan liberalisasi perdagangan barang telah dibahas sejak tahun 1947 (Geneva round). Sedangkan liberalisasi perdagangan jasa baru mulai dibahas pada tahun 1986 (Uruguay round). Pada awalnya, bidang jasa cenderung dianggap sebagai milik dan dikontrol oleh pemerintah. Bahkan di banyak negara, beberapa sektor jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa asuransi dianggap merupakan tanggung jawab dan harus dikontrol secara ketat oleh pemerintah serta tidak mungkin dilepas untuk mengikuti mekanisme pasar. Sedangkan untuk sebagian jasa lainnya seperti jasa perhotelan, restoran, sampai dengan jasa-jasa profesional secara tradisional dianggap sebagai aktivitas domestik yang tidak mengikuti konsep kebijakan perdagangan beserta instrumentasinya. (tim penyusun buku seri terjemahan persetujuan-persetujuan WTO, 2004).

Dalam perkembangannya anggapan pemerintah terhadap liberalisasi perdagangan sektor jasa mulai berubah. Sebenarnya terdapat beberapa sektor jasa seperti jasa keuangan internasional dan transportasi laut yang sudah sejak lama dibuka sebagai pelengkap perdagangan barang. Namun sejak berkembangnya teknologi internet dan produk-produk perdagangan jasa, telah menambah jenis produk jasa yang diperdagangkan secara internasional. Munculnya internet telah

¹ Peneliti Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

menghilangkan hambatan jarak bagi produsen dan konsumen yang berada di lokasi yang berjauhan. Anggapan bahwa Pemerintah adalah pihak yang dapat memberikan pasokan jasa terbaik terbukti tidak dapat bertahan seiring dengan perkembangan ekonomi yang dinamis dan inovatif. Jika dominasi tetap dipertahankan, Pemerintah akan mengalami kekurangan sumber daya dalam mengeksplorasi potensi pertumbuhan ekonomi yang ada.

1.1. Permasalahan

Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan adalah untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Dengan dibukanya perdagangan internasional, diharapkan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang berkualitas dan terjangkau akan terpenuhi. Tetapi di sisi lain, dengan dibukanya perdagangan internasional juga akan menimbulkan permasalahan lain, seperti gejolak protes sosial dan tersingkirnya industri domestik akibat kalah dalam persaingan.

Dari uraian diatas, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan bidang jasa adalah:

1. Bagaimana penerapan kerangka liberalisasi perdagangan jasa, khususnya pada kawasan regional ASEAN.
2. Bagaimana kesiapan industri sektor jasa di Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bidang jasa di ASEAN khususnya pada tahun 2010.

1.2. Tujuan Penelitian

Saat ini Pemerintah telah aktif dalam berbagai forum perdagangan internasional. Paling sedikit Indonesia telah terlibat dalam sepuluh forum pembahasan yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Dua diantara forum tersebut adalah *World Trade Organization, General Agreement on Trade in Services* – WTO, GATS dan *ASEAN Coordinating Committee on Services, Asean Framework Agreement on Services* – ASEAN CCS, AFAS. Forum-forum tersebut mengatur mekanisme perdagangan jasa internasional serta tahap-tahap liberalisasinya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk 1) mengetahui kerangka liberalisasi perdagangan bidang jasa. Perbedaan latar belakang antara sektor jasa dengan barang telah menjadikan pembahasan liberalisasi perdagangan bidang jasa (*services*) relatif berbeda jika dibandingkan dengan liberalisasi perdagangan barang (*goods*). 2) Sebagaimana diketahui bahwa liberalisasi dilakukan secara bertahap tergantung kesiapan dari masing-masing negara peserta. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peta kesiapan Indonesia terhadap sektor jasa prioritas yang akan diliberalisasi pada tahun 2010.

1.3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif adalah memberikan gambaran dan uraian mengenai Liberalisasi perdagangan bidang jasa khususnya yang ada dalam ruang lingkup regional ASEAN. Data diperoleh dari berbagai modul terkait peraturan dan perkembangan perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN. Di samping itu data yang bersifat kuantitatif juga diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan regional ASEAN, seperti World Bank dan WTO.

Dengan penggunaan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan memberi pemahaman yang utuh akan kerangka liberalisasi perdagangan bidang jasa. Di samping itu, data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang disajikan akan memberi gambaran kesiapan sektor jasa Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bidang jasa pada tahun 2010.

1.4. Tinjauan Teoritis

Perdagangan bidang jasa memiliki kerangka liberalisasi yang berbeda dengan liberalisasi barang. Menurut Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services – GATS*) kerangka liberalisasi jasa terdiri dari empat jenis yang dibedakan berdasarkan keberadaan pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Keempat jenis perdagangan atau dikenal dengan istilah Moda tersebut adalah 1) Moda 1, yaitu perdagangan dari wilayah salah satu negara anggota ke wilayah negara anggota lainnya. atau perdagangan lintas batas (*Cross-Border Supply*). 2) Moda 2, yaitu perdagangan di dalam wilayah salah satu negara anggota yang melayani konsumen dari negara anggota lain atau dikenal dengan istilah konsumsi di luar negeri (*Consumption Abroad*). 3) Moda 3, yaitu perdagangan jasa yang dilakukan oleh pemasok dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan komersial, di dalam wilayah negara anggota lainnya atau disingkat keberadaan komersial (*Commercial Presence*). 4) Moda 4, yaitu perdagangan oleh pemasok jasa dari salah satu negara anggota, melalui keberadaan *natural persons*, di wilayah negara anggota lainnya atau dikenal dengan istilah perpindahan *Natural persons* (*Movement of Natural Persons*).

Untuk dapat memahami lebih lanjut tentang moda perdagangan jasa, Tabel 1.1 akan menggambarkan ilustrasinya.

**Tabel 1.1. Contoh Empat Moda Pemasokan Jasa
(dilihat dari sisi negara pengimpor A)**

Moda 1	:	Lintas Batas Seorang pengguna dari negara A menerima jasa dari luar negeri melalui infrastruktur pos dan telekomunikasinya. Jasa tersebut antara lain berupa konsultasi atau laporan riset pasar, nasihat medis jarak jauh, pendidikan jarak jauh atau rancangan arsitektur.
Moda 2	:	Konsumsi di Luar Negeri Warga negara A bepergian ke luar negeri sebagai turis, pelajar atau pasien dalam rangka mendapatkan jasa yang dibutuhkan.
Moda 3	:	Keberadaan Komersial Jasa disediakan di dalam negara A oleh kantor lokal, afiliasi atau anak perusahaan dari sebuah perusahaan asing.
Moda 4	:	Perpindahan <i>Natural Persons</i> Warga negara asing memberikan jasanya di dalam negara A sebagai pemasok independen (seperti konsultan, pekerja kesehatan) atau pekerja dari pemasok jasa (seperti perusahaan konsultan, rumah sakit, perusahaan konstruksi)

Sumber : Persetujuan Bidang Jasa: GATS; Deplu

1.5. Gambaran Umum

Dalam lingkup ASEAN, ASEAN-CCS merupakan forum perundingan persetujuan liberalisasi bidang jasa dalam lingkup regional ASEAN. terdapat 10 sektor jasa yang menjadi pusat perhatian dalam perundingan bidang jasa yang dituangkan dalam kerangka AFAS. Persetujuan ini disepakati sejak Desember 1995. Struktur dan pendekatan liberalisasi yang dilakukan AFAS mengadopsi struktur dan pendekatan yang dimiliki oleh GATS. Keberadaan AFAS dimaksudkan untuk memberi ruang bagi sesama anggota ASEAN dalam membuka komitmen liberalisasi perdagangan jasa yang lebih liberal dibanding yang sudah dimuat dalam GATS. Pembahasan liberalisasi yang ada dalam AFAS lebih luas dari GATS. Dengan kata lain AFAS merupakan GATS- *plus*.

Persetujuan AFAS memiliki tiga tujuan utama, (1) Meningkatkan kerja sama pada sektor jasa diantara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi, suplai dan distribusi jasa di dalam ASEAN dan luar ASEAN. (2) Menghilangkan hambatan perdagangan pada sektor jasa diantara sesama anggota ASEAN. (3) Meliberalisasi perdagangan jasa

dengan memperluas kedalaman dan jangkauan dari liberalisasi yang dilakukan oleh negara anggota dalam kerangka GATS dengan maksud untuk merealisasikan zona perdagangan bebas pada sektor jasa di tahun 2015.

Walaupun tahun 2015 merupakan batas akhir rencana liberalisasi 10 sektor yang menjadi fokus dalam AFAS, tetapi implementasinya dilakukan secara bertahap. Empat sektor jasa prioritas, yaitu *healthcare*, *tourism*, *e-ASEAN*, dan *air travel* akan diliberalisasi pada tahun 2010 berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam *Vientiane Action Programme* (VAP), sementara sektor logistik pada tahun 2013, dan sisanya tahun 2015.

VAP merupakan program enam tahun dalam rangka membentuk Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang telah disepakati dalam *ASEAN summit* ke 10 yang diselenggarakan di Vientiane, Laos PDR pada 29 November 2004. Dari sebelas sektor prioritas yang disepakati dalam *Vientiane Action Programme*, terdapat empat sektor yang termasuk dalam sektor jasa prioritas, yaitu jasa pengangkutan udara (*air travel*), teknologi informasi dan komunikasi/*e-ASEAN* (*information and communication technology*), kesehatan (*healthcare*) dan pariwisata (*Tourism*). Keempat sektor tersebut sudah harus dilakukan liberalisasi pada tahun 2010.

Dilihat dari sisi waktu, maka persiapan implementasi liberalisasi sektor jasa yang tercantum dalam *Vientiane Action Programme* menjadi prioritas. Bagi Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan konsolidasi langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan secara matang apa yang harus segera dilakukan dalam periode waktu yang pendek, yaitu sebelum tahun 2010, agar Indonesia memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat serta ketahanan yang tinggi dalam menghadapi tekanan-tekanan liberalisasi global ini. Oleh karena itu, dalam paper ini disajikan analisis deskriptif terhadap keempat sektor jasa tersebut. Dengan analisis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan agar liberalisasi yang akan dilakukan dapat memberi dampak yang optimal.

Ekonomi negara-negara ASEAN dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN yang diukur dengan menggunakan *Purchasing power parity* (PPP) hanya sebesar 1.978.252 juta dollar. Tetapi menurut data ADB tahun 2009, PDB ASEAN tahun 2008 telah meningkat lebih dari satu setengah kali lipat menjadi 2.702.598 juta dollar (tidak termasuk Myanmar). Sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2, PDB Indonesia menempati urutan pertama dengan nilai mencapai 908.376 juta dollar disusul kemudian oleh Thailand, Malaysia dan Philipina. Singapura sendiri menempati urutan ke lima dengan nilai 244.185 juta dollar. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara penyumbang PDB ASEAN terbesar. Lebih dari sepertiga PDB ASEAN berasal dari Indonesia. Akan tetapi posisinya menjadi

berubah jika dilihat dari sisi PDB perkapita, Indonesia justru menempati urutan kelima dengan PDB perkapita sebesar 3.975 dollar, sedangkan singapura menempati urutan pertama dengan nilai 50.456 dollar, disusul kemudian oleh Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Posisi urutan juga kan berbeda jika dilihat dari sisi kontribusi masing-masing sektor terhadap PDB khususnya sektor jasa.

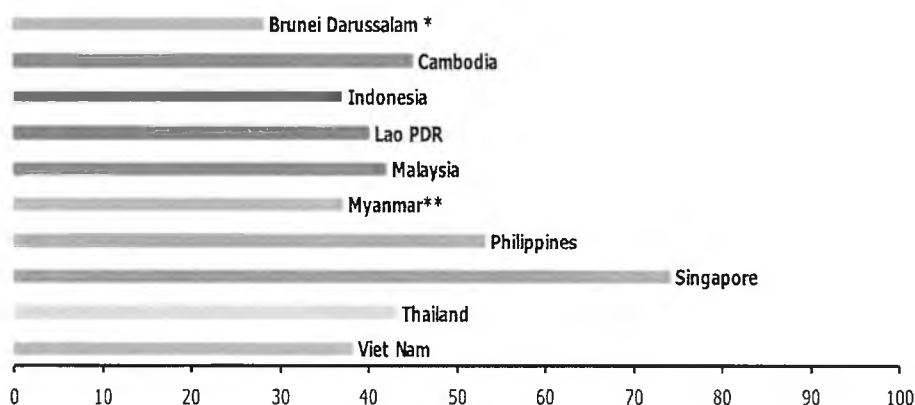
Tabel 1.2. PDB ASEAN DALAM PPP

		(dalam juta Internasional dollar)				
Negara		2004	2005	2006	2007	2008
1	Brunai Darussalam	16,951	17,567	18,917	19,540	20,076
2	Cambodia	17,230	20,143	23,016	26,039	28,421
3	Indonesia	646,288	705,159	767,401	835,901	908,376
4	Lao PDR	8,808	9,687	11,713	13,067	14,324
5	Malaysia	277,100	301,308	329,153	357,737	383,124
6	Myanmar	41,434	49,207			
7	Philippines	230,971	250,244	271,993	299,328	317,266
8	Singapore	167,660	186,650	210,199	235,988	244,185
9	Thailand	412,739	445,195	483,537	520,734	546,428
10	Viet Nam	159,071	178,075	198,801	221,330	240,398
TOTAL		1,978,252	2,163,235	2,314,730	2,529,664	2,702,598

Sumber: ADB - Key Indicators for Asia and the Pacific 2009

Kontribusi sektor jasa terhadap PDB negara-negara ASEAN tahun 2008 secara-rata-rata mencapai 46,6 persen. Angka tersebut berdasarkan rata-rata kontribusi sektor jasa terhadap PDB dari semua negara ASEAN kecuali Brunai Darussalam dan Myanmar. Sebagaimana terlihat dalam diagram 1.1, Singapura menempati posisi tertinggi kontribusi jasanya terhadap PDB, yaitu sebesar 74,14 persen disusul Philipina 53,19 persen, Cambodia 45,15 persen, thailand 43,17 persen dan Malaysia 42,17 persen. Indonesia sendiri hanya menempati urutan kedelapan dengan porsi 37,19 persen.

**Diagram 1.1. Persentase Jasa Terhadap GDP Tahun 2008
Pada Negara-Negara ASEAN**



* Persentase jasa terhadap PDB tahun 2007

**Persentase jasa terhadap PDB tahun 2006

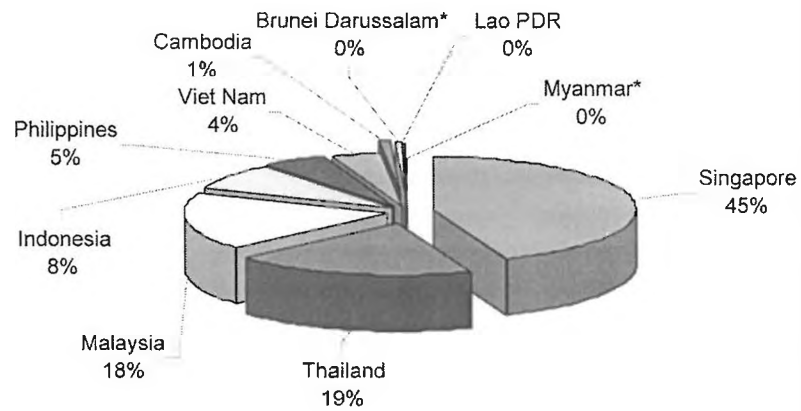
Sumber : ADB - Key Indicators for Asia and the Pacific 2009

DIAGRAM 1

Sektor jasa juga merupakan sektor yang pertumbuhan kontribusinya menunjukkan angka yang positif. Secara rata-rata, sejak dua belas tahun terakhir, pertumbuhan sektor jasa negara-negara ASEAN meningkat 0.15%. Beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia rata-rata pertumbuhannya menunjukkan angka negatif, sedangkan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang positif.

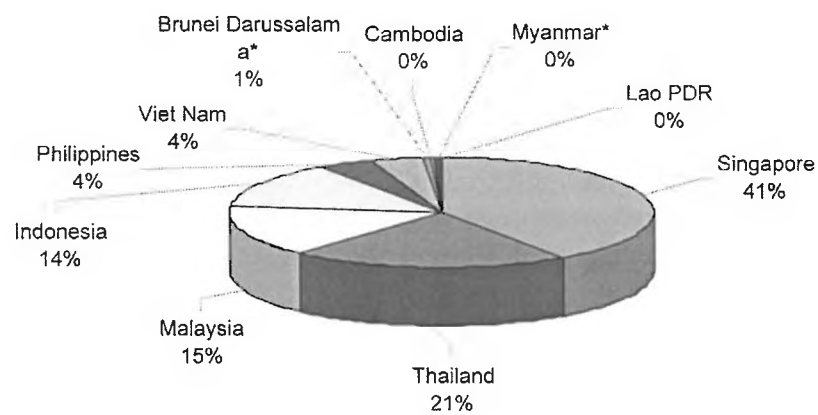
Dalam hal perdagangan internasional, ekspor ASEAN ke pasar global tumbuh dengan mantap, dari USD.78.485 juta pada tahun 2003 menjadi USD.157.702 juta pada tahun 2007. Berdasarkan total nilai ekspor antar anggota ASEAN tahun 2007, Singapura merupakan negara yang memberi sumbangan terbesar, 44,2 persen. Urutan berikutnya adalah Thailand 19,1 persen dan Malaysia 17,87 persen. Indonesia sendiri berada pada urutan keempat dengan kontribusi 7,92 persen. Sedangkan untuk negara ASEAN lainnya dapat dilihat pada diagram 1.2.

Diagram 1.2. Ekspor Jasa ASEAN 2007



Sumber :Database World Trade Organization - 2008, CEIC

Diagram 1.3. Impor Jasa ASEAN 2007



Sumber :Database World Trade Organization - 2008, CEIC

Impor jasa negara-negara ASEAN dari pasar global memiliki kecenderungan yang tidak berbeda dengan eksportnya. Impor jasa ASEAN tumbuh dari USD 103.635 juta di tahun 2003 menjadi USD 179.330 juta pada tahun 2007. Dari keseluruhan total impor antar anggota ASEAN tahun 2007, seperti halnya ekspor, Singapura juga memberi kontribusi terbesar atas impor jasa ASEAN, 40,27 persen. Sedangkan kontribusi dari negara-negara ASEAN lainnya terlihat seperti dalam diagram 1.3.

Dengan melihat profil sektor jasa, maka sektor jasa merupakan sektor di ASEAN yang memiliki prospek pertumbuhan di masa yang akan datang. Walaupun sampai dengan tahun 2008 ASEAN secara regional masih tercatat sebagai net importir dalam perdagangan jasanya, tetapi data WTO menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor ASEAN dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 terus mengalami kenaikan sebesar 11,88%. Sedangkan pertumbuhan impornya naik rata-rata 11,52%. Dengan lebih besarnya pertumbuhan ekspor dibanding impornya, diharapkan ASEAN dimasa yang akan datang akan menjadi kawasan net eksportir dalam perdagangan jasa.

Indonesia sebagai negara yang memiliki GDP terbesar dalam kawasan regional ASEAN memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan bidang jasa di ASEAN. Walaupun Indonesia masih tergolong *net* importir jasa. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekspor Indonesia termasuk tertinggi ketiga. Di samping itu, rata-rata kenaikan pertumbuhan ekspor Indonesia juga lebih tinggi dibanding impornya. Sejak tahun 2003 hingga tahun 2007, rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia naik sebesar 19,89 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan impornya naik 9,49 persen. Dengan kondisi tersebut serta *size* ekonomi yang terbesar di ASEAN, Indonesia berpotensi menjadi net eksportir sekaligus pasar jasa yang potensial di masa yang akan datang.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1. Jasa Kesehatan

Sektor jasa kesehatan memiliki pangsa (*share*) yang cukup besar terhadap total produksi domestik, yakni 1,10% menurut Tabel Input-Output Indonesia tahun 2005. Akan tetapi pangsa impornya tidak begitu besar, yaitu hanya 0,28% dari total impor Indonesia.

Dari sisi *consumption abroad*, Eksportir utama jasa kesehatan dalam perdagangan antar anggota ASEAN adalah Malaysia, Singapura dan Thailand. Melalui moda 3 ini, sektor kesehatan pada tiga negara tersebut telah menyumbang banyak devisa (Jutamas Arunanondchai and Carsten Fink, 2005). Nilai ekspor Malaysia dan Thailand atas jasa kesehatan pada tahun 2003 masing-masing

mencapai USD 40 juta dan USD 482 juta. Sedangkan pada tahun 2002, ekspor Singapura atas jasa tersebut mencapai USD 420 juta. Nilai ekspor jasa kesehatan Malaysia diperoleh melalui kedatangan 100.000 pasien dari berbagai negara di kawasan ASEAN dimana 60 persennya berasal dari Indonesia. Sedangkan dari total pasien luar negeri yang datang ke Singapura sebesar 210.000, 45 persennya berasal dari Indonesia.

Menurut penelitian Jutamas Arunanondchai and Carsten Fink, salah satu keunggulan tiga negara tersebut dalam penyediaan jasa kesehatan adalah adanya perbedaan biaya jasa kesehatan yang signifikan antara ketiga negara tersebut dengan beberapa negara maju. Ketiga negara ASEAN tersebut mampu menyediakan jenis jasa yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Sebagai contoh, pada tahun 2001 harga operasi *pay-pass* jantung koroner di Amerika mencapai USD 23.938. Sementara dengan jenis jasa yang sama, di Malaysia ditawarkan dengan harga USD 6.315 (Abidin, Alavi, and Kamaruddin, 2005). Kondisi ini menyebabkan pasien dari negara ASEAN lebih memilih untuk berobat di ketiga negara ASEAN tersebut. Bahkan, 42 persen pasien yang datang ke Thailand berasal dari negara timur jauh yang didominasi Jepang yang merupakan negara maju.

Dalam lingkup ASEAN, sektor jasa Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Dari sisi *Movement of Natural Persons* atau moda 4, Indonesia merupakan negara terbesar kedua pengekspor tenaga kesehatan. Bersama dengan Filipina, Indonesia banyak mengirim perawat dan bidan ke berbagai negara termasuk ke kawasan ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Tujuan utama ekspor Indonesia untuk tenaga kesehatan tersebut masih didominasi untuk negara kawasan timur tengah, yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Faktor bahasa dan kedekatan budaya merupakan faktor penggerak arah tujuan ekspor Indonesia. Walaupun banyak mengekspor ke berbagai negara, pasar jasa kesehatan Indonesia sendiri masih kekurangan pasokan.

Masalah kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia merupakan masalah yang telah menahun. Berbeda dengan Malaysia yang di samping mengekspor tenaga kesehatannya, juga mengimpor tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di dalam negeri. Malaysia merupakan negara penerima sekaligus pengirim tenaga kerja sektor kesehatan. Sedangkan Indonesia hanya merupakan negara pengirim. Kondisi ini menyebabkan masalah kekurangan tenaga kesehatan Indonesia menjadi masalah yang kronis.

2.2. Jasa Pengangkutan Udara

Sektor jasa pengangkutan udara memiliki pangsa (*share*) yang relative kecil terhadap total produksi domestik, yakni hanya 0,75% menurut Tabel Input-

Output Indonesia tahun 2005. Akan tetapi pangsa impornya cukup besar, yaitu mencapai 1,64% dari total impor Indonesia.

Perkembangan Jasa Pengangkutan udara di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 memperlihatkan perkembangan tersebut (tabel 2.1).

Tabel 2.1. Jumlah Penumpang Yang Memanfaatkan Transportasi Udara Penerbangan ke Luar Negeri di Indonesia Tahun 2000 – 2005

Deskripsi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Keberangkatan	4.728.389	4.675.007	4.745.681	4.275.334	5.288.070	5.528.903
Kedatangan	4.293.791	4.520.028	4.725.068	4.242.926	5.352.525	5.812.458
Transit	44.758	248.147	214.738	188.866	212.387	301.269
Jumlah	9.066.938	9.443.182	9.685.487	8.707.126	10.852.982	11.642.630
Persentase perubahan		4,15%	2,57%	-10,10%	24,64%	7,28%

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2009

Jumlah penumpang yang memanfaatkan transportasi udara untuk tujuan ke luar negeri mengalami kenaikan rata-rata diatas 5 persen setiap tahunnya. Akan tetapi, berdasarkan kajian Bappenas tahun 2004, dari jumlah pesawat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari luar negeri sampai dengan tahun 2000, sebagian besar masih menggunakan maskapai penerbangan internasional. Potensi tantangan yang akan muncul dalam persaingan di bidang pengangkutan udara adalah penerbangan asing yang dapat langsung ke daerah tujuan, dan persaingan harga tiket.

2.3. Jasa Pariwisata

Diantara empat sektor jasa prioritas yang akan diliberalisasi pada tahun 2010, jasa pariwisata merupakan sektor yang memiliki pangsa (*share*) terhadap total produksi domestik terbesar, yakni mencapai 4,47% menurut Tabel Input-Output Indonesia tahun 2005. Di samping *share* terhadap PDB yang besar, Sektor jasa juga memiliki pangsa impor yang besar, yaitu mencapai 1,97 % dari total impor Indonesia. Dari hasil riset *World travel and tourism council* tahun 2006, melalui sektor ini Indonesia diperkirakan akan menjadi negara yang masuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki pertumbuhan tenaga kerja pada sektor pariwisatanya tertinggi di dunia. Jumlah tenaga kerja yang akan terserap pada sektor ini diperkirakan mencapai 1.838.100 pada setiap tahunnya hingga tahun 2015.

Pariwisata merupakan sektor yang diharapkan dapat tumbuh sebagai sektor pendulang devisa. Dengan melihat data statistik, harapan tersebut kiranya tidak berlebihan. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2008 mencapai angka 6.234.497 orang dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25%. Dari jumlah tersebut 44,8 persennya berasal dari negara anggota ASEAN.

Walaupun jumlah wisatawan asing yang berasal dari kawasan ASEAN memiliki porsi yang besar dan terus mengalami kenaikan, tetapi pertumbuhannya relatif kecil. Sampai dengan tahun 2008, pertumbuhan jumlah wisatawan asing yang tertinggi adalah yang berasal dari Republik Rakyat Cina, dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 48%. Sementara wisatawan asing yang berasal dari negara anggota ASEAN rata-rata pertumbuhannya hanya 5,38%. Pada tahun 2002, jumlah wisatawan asing yang datang dari Republik Rakyat Cina hanya 0,73% dari seluruh wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Namun pada tahun 2008, persentase tersebut telah mengalami kenaikan hingga mencapai 5,4%.

Diantara negara anggota ASEAN sendiri, Singapura merupakan negara yang penduduknya banyak mengunjungi Indonesia. Pada tahun 2008, jumlah wisatawan asing asal Singapura mencapai 50% dari semua wisatawan asing yang datang ke Indonesia yang berasal dari negara anggota ASEAN. Disusul kemudian oleh Malaysia 40%, Filipina 5,7%, dan Thailand 2,7%. Sementara persentase wisatawan asing yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya hanya mencapai kurang dari 1%.

Di samping pertumbuhannya yang relatif rendah, Wisatawan asing yang berasal dari Asia memiliki rata-rata lama tinggal yang lebih singkat jika dibandingkan dengan wisatawan asing asal Eropa atau Timur Tengah. Wisatawan asal Singapura memiliki masa kunjungan yang paling singkat diantara sepuluh negara yang merupakan pasar utama pariwisata Indonesia. Sedangkan Wisatawan asing yang memiliki rata-rata masa kunjungan paling lama yaitu sekitar dua minggu berasal dari USA, Inggris, Jerman, dan Belanda (kajian Bappenas tahun 2004).

Dalam kaitanya dengan pasar bebas *tourism* ASEAN 2010, Indonesia bukan termasuk negara yang paling siap. Untuk melihat dampak pariwisata terhadap pembangunan serta daya saing atas sektor pariwisata, dapat digunakan dua indikator, yaitu Tourism Impact Index (TII) dan Tourism Participation Index (TPI). Dari sisi indeks TII, Indonesia masih ketinggalan dengan beberapa negara ASEAN lainnya (tabel 2.2).

Tabel 2.2. Tourism Impact Index (TII)

Negara	1990	1995	2000	2004
Malaysia	8,49	11,16	11,71	20,53
Singapura	22,70	25,25	19,71	18,96
Thailand	7,24	11,71	19,43	16,48
Indonesia	2,89	5,62	9,30	9,75
Philipina	3,67	5,99	6,17	2,85

Sumber : World Bank, World Development Index, 2004.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak industri pariwisata terhadap perekonomian Indonesia secara langsung masih rendah jika dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Begitu juga dengan Indeks TPI, Indonesia masih dibawah beberapa negara ASEAN lainnya (tabel 2.3). Hal ini menunjukkan *ratio* antara jumlah wisatawan yang masuk dan wisatawan domestik yang keluar negeri dibandingkan dengan total penduduk Indonesia masih tergolong rendah.

Tabel 2.3. Tourism Participation Index (TPI)

Negara	1990	1995	2000	2004
Malaysia	20,52	13,65	10,32	11,00
Singapura	24,19	24,44	15,59	15,35
Thailand	1,68	1,25	0,89	0,95
Indonesia	0,20	0,26	0,17	0,19
Philipina	0,54	0,47	0,31	0,31

Sumber : World Bank, World Development Index, 2004.

2.4. Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Tabel Input-Output Indonesia tahun 2005, Sektor Jasa teknologi informasi dan komunikasi merupakan industri jasa yang memiliki pangsa (*share*) terhadap total produksi domestik sebesar 1,67%. Namun demikian, Sektor ini memiliki pangsa impor yang relatif kecil, yaitu hanya 0,63 % dari total impor Indonesia.

Dengan letak geografis terdiri dari lebih dari 13.600 pulau, dan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar Jasa teknologi informasi dan komunikasi yang sangat potensial. Menurut data dari situs Departemen Komunikasi dan Informasi, penetrasi infrastruktur telekomunikasi di

Indonesia masih tergolong rendah. dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 218.868.791 pada tahun 2005, jumlah pelanggan *fixed line* teleponnya hanya 8.750.229. ari ($\pm 4\%$ dari jumlah penduduk) (BPS, 2005). Konsumsi teknologi informasi di Indonesia juga hanya mencapai USD1,9 miliar pada tahun 2005. 80% dari angka tersebut didominasi oleh peranti keras. Produk piranti lunaknya endiri hanya mencapai 8%. Bila diproyeksikan terhadap PDB, maka angka konsumsi TI Indonesia di atas hanya sekitar 0,7%. Idealnya, konsumsi IT di Indonesia bisa mencapai USD 3 miliar. Dengan dibukanya pasar bebas sektor jasa prioritas pada tahun 2010, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi negara anggota ASEAN lainnya. Inilah yang menjadi tantangan dalam persaingan idustri jasa teknologi informasi dan komunikasi.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sesuai dengan uraian yang ada dalam tinjauan teoritis dan analisis, maka liberalisasi perdagangan bidang jasa tidak dilakukan atas dasar pemaksaan atau intervensi dari satu negara ke negara lainnya, akan tetapi dilakukan dengan kerangka yang saling menguntungkan serta berdasarkan kesepakatan. Di samping itu, sektor yang akan diliberalisai juga dibatasi berdasarkan prioritas.

Indonesia dengan jumlah penduduk dan PDB terbesar di kawasan ASEAN memiliki peluang untuk bisa mengendalikan pasar empat sektor jasa prioritas pada rencana liberalisasi empat sektor tersebut di kawasan ASEAN pada tahun 2010. Walaupun pertumbuhan sektor jasa indonesia secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang positif, Indoesia masih memiliki kendala dalam menghadapi perdagangan bebas empat sektor jasa prioritas. Dari sisi jasa kesehatan, Indonesia masih menjadi negara pengirim pasien terbesar ke beberapa negara ASEAN. Di sisi lain, Indonesia mampu menjadi negara pengekspor tenaga kesehatan terbesar, meskipun harus mengorbankan pasar domestik yang masih kekurangan suplai tenaga kesehatan. Untuk jasa pariwisata, dampak sektor ini terhadap pembangunan dan partisipasi masyarakatnya masih rendah. meskipun sektor ini memiliki *share* yang besar terhadap PDB. Sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena di samping memiliki *share* yang besar, sektor ini menurut prediksi *World travel and tourism council* merupakan sektor yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor pengangkutan udara Indonesia menyimpan potensi pasar yang sangat besar. Sayangnya dari jumlah penumpang yang datang ke Indonesia, hanya sedikit yang menggunakan jasa penerbangan dalam negeri. Begitu juga dengan sektor jasa teknologi informasi, potensinya sangat besar karena ratio penetrasi infrastruktur telekomunikasi Indonesia masih tergolong rendah.

Dengan rencana dibukanya pasar bebas untuk empat sektor jasa prioritas pada tahun 2010, perlu dilakukan kajian yang lebih detil untuk mengetahui yang

mana diantara empat sektor jasa tersebut yang merupakan sektor unggulan. Di samping itu, perlu juga dihitung seberapa besar dampak naik atau turunnya impor atas jasa tersebut serta pengaruhnya terhadap produksi domestik. Setelah diketahui pengaruhnya, terutama dengan diketahuinya jenis sektor lain yang akan terkena, maka dari sisi penerapannya, juga perlu dilakukan secara bertahap.

Perlu juga bagi Indonesia untuk membuat standardisasi jasa bagi penyedia jasa dari luar negeri yang akan masuk ke pasar Indonesia. Dengan adanya standardisasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pendukung dalam perundingan/negosiasi liberalisasi perdagangan jasa guna melindungi kepentingan produsen dan sekaligus konsumen domestik.

Itulah beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan agar Pemerintah memperoleh informasi yang valid mengenai seberapa besar manfaat dan biaya dari penerapan pasar bebas di kawasan ASEAN untuk keempat sektor jasa prioritas tersebut. Pada prinsipnya, Beberapa rekomendasi tersebut dimaksudkan dalam rangka mengurangi dampak negatif dari dibukanya pasar bebas sektor jasa di wilayah ASEAN.

Daftar Pustaka

- , Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1995, tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk, dan Izin Keimigrasian.
- , Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- ASEAN Secretariat, ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU) Database, Jakarta
- ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook. 2006. Jakarta.
- Gatot S Hardono, Handewi PS Rachman, Sri H Suhartini. 2004. *Liberalisasi Perdagangan, Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan: Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 22 No.2. Desember 2004. Bogor, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
- Hadi.PU.2003. *Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agriculture commodities facing trade liberalization: Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 1 (2). Juni 2003. Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
- <http://aptel.depkominfo.go.id>
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya Edisi kedelapan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Pratomo, Wahyu. 2007. *Teori Kerja Sama Perdagangan Internasional. Kerja Sama Perdagangan Internasional : Peluang dan tantangan bagi Indonesia*. Editor: Syamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph. Bank Indonesia dan Elex Media Komputindo. Jakarta.

Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 14 No. 1 Tahun 2010

Suranovic, Stave. 1997. *The International Trade Theory and Policy Text Book*, George Washington University, seperti tercantum dalam <http://internationalecon.com/Trade/tradehome.php>

Tim Pemantauan Kebijakan Sektor Jasa. 2006. *Laporan Hasil Kegiatan Pemantauan*. Biro Perdagangan dan Biro Kerja Sama Internasional Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi. Jakarta.

Tim Penyusun Buku Seri Terjemahan Persetujuan-persetujuan WTO. 2004. *Persetujuan Bidang Jasa: General Agreement on Trade in Services/GATS*. Departemen Luar Negeri RI. Jakarta.

Viner .1950. *The Custom Union Issue*, New York: Carnegie Endowment for International Peace.

World Bank, *World Development Indicators*, 2009

World travel and tourism council, 2006. *Progress and Priorities 2006/2007*

WTO. 2005. *International Trade Statistic*